

**STRATEGI PEMERINTAH  
KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG  
DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMUNGUTAN  
DAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
memperoleh gelar sarjana ilmu politik*



**FIRMA NOVITA**

**06194012**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2010**



## ABSTRAK

Firma Novita, 06194012. "Strategi Pemerintah Kecamatan Bungus Teluk Kabung dalam Upaya Meningkatkan Pemungutan dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan". i-vii.175 halaman. Bab 1-6. 5 lampiran. 31 buku. 5 skripsi.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan terhadap pemanfaatan atas bumi atau bangunan oleh masyarakat. Pajak Bumi dan Bangunan, yang dipungut berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1994, saat ini semakin menjadi prioritas pendukung keuangan daerah di Indonesia. Bagaimana tidak, Pajak Bumi dan Bangunan selalu menjadi pendapatan negara yang mampu menopang kebutuhan keuangan di Kabupaten/Kota. Di Kota Padang, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, sudah cukup baik. Semakin meningkatnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, tentunya disebabkan kontribusi yang signifikan dari 11 kecamatan di Kota Padang. Salah satunya yang sangat menarik adalah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Daerah ini mempunyai 49,6% warga kurang mampu dari total 21.523 penduduk. Meskipun sebagai daerah miskin, namun realisasi penerimaan pajak di kecamatan ini cukup bagus. Pada tahun 2008, Kecamatan ini mampu merealisasikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan hingga 117,8%. Hal ini membawa Kecamatan Bungus Teluk Kabung menduduki posisi ke 3 dari 11 kecamatan di Kota Padang.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, strategi Kecamatan Bungus Teluk Kabung untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, yang dianalisis dengan analisis model SWOT, didasarkan kepada 4 jenis strategi, yaitu *comparative advantage strategy*, *investment/ divestment strategy*, *mobilization strategy* dan *damage control strategy*. Berdasarkan 4 jenis strategi tersebut, Kecamatan Bungus Teluk Kabung menerapkan 6 buah strategi. Strategi tersebut adalah strategi *Comparative Advantage*, dengan menunjuk Kowilja sebagai unit kerja penanggung jawab Pajak Bumi dan Bangunan. Strategi *Investment/ Divestment* dengan memaksimalkan kinerja kolektor dengan memberikan pelatihan bekerja sama dengan Pemkot serta memberikan reward bagi kelurahan dan kolektor yang mampu merealisasikan pemungutan PBB dengan baik. Strategi *Mobilization* dengan melakukan sosialisasi PBB satu kali dalam setahun serta manajemen pengendalian operasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Dan strategi *Damage Control* melalui *Law enforcement*

Kata kunci : Strategi, Pajak Bumi dan Bangunan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi yang telah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu di negara Indonesia telah membawa perubahan terhadap seluruh aspek kehidupan. Salah satu aspek reformasi yang paling dominan berada pada aspek pemerintahan. Aspek pemerintahan yang dimaksudkan adalah aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada aspek ini yang mencuat adalah tuntutan pelaksanaan otonomi yang lebih luas dan nyata yang diberikan kepada daerah, khususnya kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Tuntutan tersebut pada dasarnya melahirkan berbagai perubahan bagi pelaksanaan pemerintahan daerah, sebagai dampak dari implementasi sistem pengelolaan pemerintahan yang terjadi pada masa sebelum reformasi.

Kritik yang dahulu muncul pada masa sebelum reformasi adalah dimana campur tangan Pemerintah Pusat terlalu dominan pada Pemerintah Daerah. Pola pendekatan yang sentralistik dan seragam yang dikembangkan Pemerintah Pusat diklaim telah mematikan inisiatif dan kreativitas daerah. Pemerintah Daerah kurang diberi kekuasaan (*local discretion*) untuk menentukan kebijakan daerahnya sendiri. Hal ini terlihat dengan otonomi daerah yang diberikan selama ini tidak disertai dengan pemberian infrastruktur yang memadai.<sup>1</sup> Padahal

---

<sup>1</sup> Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Andi. Hlm 96



Pemerintah Daerah harus diberikan kesempatan kemandirian dalam mengelola pembangunan di daerahnya sendiri. Meskipun pada kenyataannya pada masa tersebut telah terdapat Undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, namun dinilai masih belum mampu memberikan kepastian kewenangan dan perimbangan keuangan pada daerah. Di dalam peraturan tersebut bahkan kekuasaan terpusat masih ada pada Pemerintah Pusat, bukan berada pada Pemerintah Daerah.

Besarnya arahan dan campur tangan dari Pemerintah Pusat tersebut didasarkan kepada dua alasan utama, yaitu untuk menjamin stabilitas nasional dan karena alasan kondisi sumber daya manusia daerah yang dirasa masih relatif lemah. Karena dua alasan itulah, sentralisasi otoritas dipandang sebagai prasyarat untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>2</sup> Namun dalam jangka panjang, sentralisasi seperti itu telah memunculkan masalah rendahnya akuntabilitas serta lambatnya pembangunan infrastruktur.<sup>3</sup>

Oleh sebab itu, maka perwujudan bentuk keseriusan pemerintah Indonesia dalam rangka menjalankan otonomi daerah yang diharapkan mampu berjalan dengan jauh lebih baik dari sebelumnya, dengan munculnya tuntutan otonomi tersebut, maka pemerintah membentuk Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Esensi kebijakan otonomi daerah

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hlm 96

<sup>3</sup> *Ibid.*, Hlm 97

kemudian menempatkan Kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomi, seperti telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah.<sup>4</sup> Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di daerah. Hal tersebut membawa angin baru bagi perkembangan pembangunan daerah di Indonesia, yang tentunya juga diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan, perbaikan kesejahteraan, serta jaminan hidup yang lebih baik kepada masyarakat.

Revisi terhadap peraturan mengenai otonomi daerah ini juga memberikan implikasi yang sangat mendasar terhadap perlunya reformasi sektor publik dan implementasi paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Reformasi sektor publik tersebut harus diikuti dengan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik,<sup>5</sup> yang nantinya akan melakukan perubahan melalui membenahan alat-alat negara serta berbagai bentuk cara maupun prosedur pengelolaannya.

Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi ini pun membuka jalan bagi Pemerintah Daerah untuk memberlakukan pembaharuan dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Daerah. Kemunculan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (yang saat ini disempurnakan dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004) dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (disempurnakan dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004), telah

<sup>4</sup> Sani, Hardjari. 2006. Skripsi judul, "*Strategi Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah*". Universitas Tarumanegara. Surabaya

<sup>5</sup> Mardiasmo., Op.cit. Hlm 97



## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan langkah dan strategi Kecamatan Bungus Teluk Kabung dalam upaya meningkatkan pemungutan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, maka penulis telah menemukan beberapa strategi. Adapun kesimpulan strategi yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah dimana dalam upaya meningkatkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, pemerintah Kecamatan Bungus Teluk Kabung mempunyai enam bentuk strategi. Strategi tersebut penulis klasifikasikan terhadap model SWOT menurut Kearns, sehingga terbagi menjadi empat jenis kelompok strategi, yaitu strategi *Comparative Advantage*, strategi *Investment/ Divestment*, strategi *Mobilization*, serta strategi *Damage Control*. Adapun strategi yang dijalankan oleh Kecamatan Bungus Teluk Kabung dalam upaya meningkatkan pemungutan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

##### 1. Strategi *Comparative Advantage*

- Menunjuk Kowilja sebagai unit kerja penanggung jawab Pajak Bumi dan Bangunan

##### 2. Strategi *Investment/ Divestment*

- Memaksimalkan kinerja kolektor dengan memberikan pelatihan bekerja sama dengan Pemkot.

- Memberikan reward bagi kelurahan dan kolektor yang mampu merealisasikan pemungutan PBB dengan baik.

### 3. Strategi *Mobilization*

- Melakukan sosialisasi PBB satu kali dalam setahun
- Manajemen pengendalian operasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

### 4. Strategi *Damage Control*.

- *Law enforcement*

## 6.2 Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis telah menemukan berbagai kelemahan dan kekurangan yang dihadapi oleh Kecamatan Bungus Teluk Kabung, saran yang dapat penulis sampaikan terkait dengan strategi yang diterapkan oleh pemerintah Kecamatan Bungus Teluk Kabung dalam upaya meningkatkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

- a. Pemerintah Kecamatan Bungus Teluk Kabung perlu melakukan perbaikan sistem pengelolaan pajak yang efektif dan efisien dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat pengelola pajak, seperti kolektor dengan melakukan pelatihan yang secara kontinyu.
- b. Perlu diciptakannya jaringan pelaksana pungutan yang tersebar di setiap wilayah kerja Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arnaldi. 2008. Bahan materi kuliah *Pajak dan Retribusi Daerah*. Padang: Universitas Andalas.
- Bungin. Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bohari. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Creswell, John. 2002. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach (buku terjemahan KIK UI)*. Jakarta: KIK Press.
- Devas, Nick, dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (terjemahan)*. Jakarta: UI Press.
- Djunaedi, Achmad. 1995. Perencanaan Strategik untuk Perkotaan : Belajar dari Pengalaman Negara Lain. Yogyakarta : *Jurnal PWK* No. 19/ Juni 1995.
- , 2002. Bahan materi kuliah "Teori dan Konsep Perencanaan Strategis (Perencanaan Strategi : Kajian dari Perspektif PerencanaanPublik)". Program MPKD. Universitas Gadjah Mada .
- Gunadi. John, Hutagaol. dkk. 1999. *Perpajakan*. Jakarta : FEUI.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Haricahyono, Cheppy. *Ilmu Politik dan Perspektifnya*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mardiasmo. 1997. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- , 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mas'oed, Mochtar. 2006. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.